



KONSTRUKSI IDENTITAS KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL MELALUI INTERAKSI LINTAS ETNIS: KERANGKA KONSEPTUAL BERBASIS FALSAFAH HUMA BETANG

Dotrimensi^{1*}, Sakman², Triyani³, Ali Sunarno⁴

¹²³⁴Universitas Palangkaraya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 8 September 2026

Accepted 18 October 2026

Available online 30 October 2026

Kata Kunci:

Falsafah Huma Betang;
Identitas Kewarganegaraan
Multikultural; Interaksi
Lintas Etnis; Pendidikan
Kewarganegaraan;
Perguruan Tinggi Kalimantan
Tengah

Keywords:

Central Kalimantan Higher
Education; Citizenship
Education; Cross-Ethnic
Interaction; Huma Betang
Philosophy; Multicultural
Citizenship Identity

ABSTRAK

Keragaman etnis menuntut identitas kewarganegaraan yang mengakui perbedaan, dan perguruan tinggi merupakan ruang perjumpaan lintas etnis yang intensif bagi generasi muda. Falsafah Huma Betang kerap dirujuk sebagai sumber nilai kebersamaan di Kalimantan Tengah, tetapi hubungannya dengan interaksi lintas etnis dan identitas kewarganegaraan multikultural mahasiswa belum dirumuskan secara konseptual. Artikel ini menyusun kerangka tersebut melalui telaah naratif integratif terarah dengan pengodean tematik dan triangulasi antarjenis bukti. Sintesis menghasilkan tiga proposisi: penghayatan nilai Huma Betang diperkirakan meningkatkan kualitas interaksi lintas etnis (P1); kualitas interaksi diperkirakan memperkuat identitas kewarganegaraan multikultural yang tetap mengakui identitas etnis (P2); dan dukungan kelembagaan diperkirakan memperkuat hubungan tersebut (P3). Huma Betang ditempatkan sebagai ruang dialog lintas tradisi, bukan norma satu etnis yang harus diadopsi kelompok lain. Kerangka ini memberi kontribusi teoretis bagi Pendidikan Kewarganegaraan dan masih memerlukan pengujian empiris pada mahasiswa Kalimantan Tengah.

ABSTRACT

Ethnic diversity calls for a citizenship identity that recognizes difference, and higher education is an intensive site of cross-ethnic encounter for young people. The Huma Betang philosophy is widely invoked as a source of togetherness in Central Kalimantan, yet its relationship with cross-ethnic interaction and students' multicultural citizenship identity has not been conceptually specified. This article develops such a framework through a directed integrative narrative review using thematic coding and triangulation across types of evidence. The synthesis yields three propositions: lived Huma Betang values are expected to improve the quality of cross-ethnic interaction (P1); interaction quality is expected to strengthen a multicultural citizenship identity that continues to recognize ethnic identity (P2); and institutional support is expected to strengthen this relationship (P3). Huma Betang is positioned as a space for dialogue across traditions rather than a single group's norm to be adopted by others. The framework contributes theoretically to Citizenship Education and requires empirical testing among Central Kalimantan students.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



1. Pendahuluan

Keragaman etnis, agama, dan budaya merupakan kenyataan struktural yang melekat pada eksistensi Indonesia sebagai bangsa. Kenyataan ini menuntut setiap warga negara memiliki

* Corresponding author.

E-mail addresses: dotrimensi@fkip.upr.ac.id

identitas kewarganegaraan yang cukup lentur untuk merangkul perbedaan tanpa kehilangan rasa memiliki terhadap bangsa. Nabilah dkk. (2024) mencatat bahwa multikulturalisme di Indonesia masih menghadapi hambatan nyata dalam membangun solidaritas kewarganegaraan, terutama karena kurangnya toleransi terhadap perbedaan suku, budaya, agama, dan golongan yang berlangsung di berbagai ruang sosial. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berhenti menjadi slogan administratif apabila tidak dihidupi melalui praktik sosial yang nyata, terutama pada ruang-ruang sosial tempat individu berlatar belakang etnis berbeda saling bertemu dan berinteraksi secara intensif. Perguruan tinggi adalah salah satu di antaranya. Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dengan tradisi, bahasa, dan cara pandang yang berlainan dipertemukan dalam satu lingkungan akademik, sehingga proses saling mengenal antaretnis berlangsung hampir setiap hari, baik di ruang kuliah, organisasi kemahasiswaan, maupun kehidupan asrama. Interaksi semacam ini menyimpan dua kemungkinan sekaligus: ia mampu memperkuat toleransi dan solidaritas lintas kelompok, tetapi ia juga mampu memicu prasangka dan jarak sosial apabila berlangsung tanpa kerangka nilai yang memadai untuk menuntunnya.

Dinamika semacam ini dapat dijelaskan secara teoretis. Teori identitas sosial yang dirumuskan Tajfel dan Turner (1979) menempatkan keanggotaan kelompok sebagai bagian dari konsep diri, sehingga kategorisasi sosial dapat melahirkan favoritisme terhadap kelompok sendiri dan bias terhadap kelompok lain ketika batas antarkelompok dipertegas tanpa ruang dialog. Hipotesis kontak yang berakar pada Allport (1954, sebagaimana dikutip dalam Pettigrew & Tropp, 2006) menawarkan sisi sebaliknya: perjumpaan antarkelompok berpeluang meredakan prasangka, terutama apabila berlangsung dalam status yang setara, mengarah pada tujuan bersama, melibatkan kerja sama, serta didukung otoritas atau norma kelembagaan. Meta-analisis Pettigrew dan Tropp (2006) atas 515 penelitian dengan 713 sampel independen menunjukkan bahwa kontak antarkelompok umumnya berkaitan dengan berkurangnya prasangka, sementara kondisi-kondisi tersebut memperbesar manfaatnya tanpa menjadi syarat mutlak. Model identitas kelompok bersama (Gaertner & Dovidio, 2000) selanjutnya menjelaskan bahwa bias dapat berkurang ketika anggota kelompok yang berbeda memandang diri sebagai bagian dari satu kelompok yang lebih inklusif, meskipun Dovidio dkk. (2009) mengingatkan bahwa identitas bersama yang menutupi perbedaan dapat mengaburkan ketimpangan antarkelompok. Temuan Belianti dkk. (2025) pada komunitas mahasiswa daerah di FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya memperlihatkan dinamika serupa di lingkungan kampus: pertukaran gagasan lintas budaya memperkaya kehidupan akademik, tetapi pengelolaan perbedaan budaya juga dapat memunculkan ketegangan dan kesalahpahaman. Perguruan tinggi, dengan demikian, tidak secara otomatis menghasilkan sikap kewarganegaraan yang inklusif hanya karena mahasiswanya berasal dari berbagai etnis. Dibutuhkan kerangka nilai dan dukungan kelembagaan yang mampu mengarahkan interaksi tersebut ke arah konstruksi identitas bersama, bukan sekadar toleransi pasif yang berhenti pada sikap saling membiarkan.

Kalimantan Tengah menghadirkan konteks yang khas untuk mendudukan persoalan tersebut. Hasil Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan kemajemukan penduduk provinsi ini: dari 2.207.367 penduduk warga negara Indonesia, kategori suku asal Kalimantan lainnya mencakup 26,67%, Jawa 21,67%, Banjar 21,03%, Dayak 20,42%, Melayu 3,91%, Madura 1,93%, Bugis 0,36%, dan suku lainnya 4,00% (Badan Pusat Statistik, 2011). Kategori "Dayak" dan "suku asal Kalimantan lainnya" dicatat terpisah dalam tabulasi tersebut sehingga keduanya tidak digabungkan dalam artikel ini. Data ini digunakan sebagai konteks kemajemukan wilayah, bukan sebagai gambaran komposisi etnis mahasiswa saat ini, yang perlu ditetapkan melalui data perguruan tinggi tersendiri.

Kemajemukan tersebut juga perlu dibaca bersama sejarah kekerasan antarkelompok. Laporan International Crisis Group (2001) mencatat pecahnya kekerasan di Sampit pada 18 Februari 2001 yang kemudian meluas dan memicu pengungsian, serta menganalisisnya dalam kaitan dengan persoalan kekuasaan, penghidupan, marginalisasi, dan penanganan keamanan. Kajian retrospektif Wulandari dkk. (2022) menyoroti bahwa pemulihan relasi pascakonflik ditopang oleh rekonsiliasi, musyawarah, serta peran tokoh adat dan agama. Pembacaan historis ini membatasi anggapan bahwa keberadaan nilai kebersamaan dengan sendirinya menjamin hubungan yang damai. Di tengah kemajemukan itu, masyarakat Kalimantan Tengah mewarisi

falsafah Huma Betang, nilai hidup yang lahir dari rumah panjang adat Dayak dan mengajarkan kebersamaan, musyawarah, kesetaraan, gotong royong, serta toleransi. Bidin (2026) menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai warisan simbolis, melainkan tetap hidup dalam keseharian masyarakat dan berpotensi menjadi sumber epistemologi lokal yang dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menumbuhkan karakter sosial yang adaptif dalam masyarakat multikultural. Karliani dkk. (2018) bahkan membahas Huma Betang sebagai prototipe solidaritas dan pencegahan konflik etnis. Karena itu, Huma Betang dalam artikel ini ditempatkan sebagai sumber nilai yang penerapannya perlu ditelaah bersama kondisi kelembagaan dan relasi antarkelompok, bukan sebagai jaminan harmoni.

Kajian mengenai Huma Betang bukan hal baru dalam literatur akademik, dan sepanjang lima tahun terakhir kajiannya justru semakin berkembang dari berbagai sudut pandang. Loi dkk. (2023) mengangkat falsafah ini sebagai model nilai filosofi hidup masyarakat Dayak dan memaknai praktik *handep* serta *hafakat basara* sebagai kerja bersama dan permusyawaratan, sementara Badriah dkk. (2025) menyoroti perannya dalam pewarisan pendidikan karakter pada mahasiswa di Kota Palangka Raya. Pattiasina (2025) memperluas pembahasan pada peran Huma Betang dalam merajut harmoni antarumat beragama dan identitas nasional. Pada jenjang pendidikan dasar, Sugiyanto dkk. (2019) telah mengkaji internalisasi falsafah rumah betang untuk membentuk sikap toleransi, baik melalui muatan lokal berbasis etnopedagogi maupun melalui keteladanan guru. Dengan demikian, kontribusi artikel ini tidak diletakkan pada klaim bahwa internalisasi Huma Betang atau konteks mahasiswa belum pernah diteliti. Kajian-kajian yang ditelaah umumnya berfokus pada pewarisan nilai, pembentukan karakter, harmoni, atau sikap toleransi sebagai keluaran, dan belum merumuskan secara eksplisit hubungan antara penghayatan nilai Huma Betang, kualitas interaksi lintas etnis, dan identitas kewarganegaraan multikultural, termasuk peran dukungan kelembagaan di dalamnya. Ruang inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Konsep kunci yang digunakan perlu didudukkan lebih dahulu. Kymlicka (1995) merumuskan kewarganegaraan multikultural sebagai upaya mendamaikan kesetaraan hak warga negara dalam demokrasi liberal dengan pengakuan terhadap keanggotaan budaya kelompok minoritas, sehingga kesetaraan tidak dimaknai sebagai keseragaman. Banks (2008) membawa gagasan tersebut ke ranah pendidikan dengan menegaskan bahwa warga negara dapat mempertahankan identitas budayanya sembari mengembangkan keterikatan pada komunitas politik bersama dan berpartisipasi secara demokratis, sehingga pendidikan kewarganegaraan yang bersifat asimilasionis tidak lagi memadai bagi masyarakat majemuk. Berdasarkan kedua rujukan tersebut, identitas kewarganegaraan multikultural dalam artikel ini dimaknai sebagai rasa keanggotaan dalam komunitas politik bersama, baik bangsa maupun komunitas akademik, yang dibangun tanpa menuntut penanggalan identitas etnis, serta disertai pengakuan atas kesetaraan hak, kepedulian terhadap diskriminasi, dan kesediaan berpartisipasi bersama. Definisi ini membedakan identitas kewarganegaraan multikultural dari sekadar kerukunan atau keramahan antarpribadi.

Artikel ini bertujuan menyusun kerangka konseptual mengenai konstruksi identitas kewarganegaraan multikultural melalui interaksi lintas etnis mahasiswa, dengan menempatkan falsafah Huma Betang sebagai landasan nilai sekaligus lensa analitis. Kerangka tersebut dirumuskan dalam bentuk proposisi yang menjelaskan hubungan antara penghayatan nilai, kualitas interaksi, identitas kewarganegaraan multikultural, dan dukungan kelembagaan, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Kerangka ini diharapkan memberi sumbangan teoretis bagi kajian Pendidikan Kewarganegaraan mengenai bagaimana kearifan lokal dapat dioperasionalkan tanpa terjebak pada asimilasi budaya, sekaligus menjadi rujukan awal bagi perguruan tinggi di Kalimantan Tengah dalam merancang kebijakan dan praktik pendidikan yang mendukung interaksi lintas etnis secara sehat. Karena disusun melalui telaah kepustakaan, kerangka ini bersifat proposisional dan terbuka untuk diuji secara empiris pada penelitian selanjutnya.

2. Metode

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan berbentuk telaah naratif integratif terarah (*directed integrative narrative review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Telaah integratif dipilih karena bertujuan menilai, mengkritisi, dan menyintesis literatur sehingga memungkinkan lahirnya kerangka atau perspektif teoretis baru, bukan menghitung besaran efek sebagaimana tinjauan sistematis atau meta-analisis (Snyder, 2019; Torraco, 2005). Jaya dkk. (2023) menjelaskan bahwa telaah kepustakaan dilakukan dengan merumuskan masalah dan tujuan, menemukan sumber yang kredibel, menilai sumber secara kritis, mencatat temuan secara terorganisasi, lalu menyintesisnya ke dalam laporan yang sistematis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur atau menguji hubungan antarvariabel di lapangan, melainkan untuk menyusun proposisi konseptual tentang konstruksi identitas kewarganegaraan multikultural melalui interaksi lintas etnis berbasis falsafah Huma Betang. Sifat deskriptif tampak pada pemaparan sistematis nilai-nilai Huma Betang, teori identitas sosial dan kontak antarkelompok, serta konsep kewarganegaraan multikultural sebagaimana ditemukan dalam literatur, sedangkan sifat analitis tampak pada upaya menghubungkan, membandingkan, dan menafsirkan temuan tersebut untuk menghasilkan proposisi yang koheren.

Bahan kajian dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Istilah sumber primer dalam telaah ini merujuk pada karya asli penggagas teori atau konsep serta kajian yang secara langsung membahas falsafah Huma Betang, bukan data empiris yang dikumpulkan sendiri oleh penulis. Kriterianya ialah (a) merupakan karya penggagas teori identitas sosial, kontak antarkelompok, identitas kelompok bersama, atau kewarganegaraan multikultural; atau (b) melaporkan kajian konseptual maupun lapangan tentang nilai Huma Betang dalam pendidikan, harmoni sosial, atau pengelolaan konflik di Kalimantan Tengah. Sumber sekunder adalah bahan yang memberi konteks atau memperkuat penafsiran, yaitu statistik kependudukan, laporan historis konflik, telaah teori dan meta-analisis, kajian interaksi antarbudaya mahasiswa di luar Kalimantan Tengah, serta rujukan metodologi. Perbedaan ini sekaligus menentukan fungsi evidensial setiap sumber: statistik dan laporan hanya digunakan sebagai konteks, kajian kualitatif sebagai dasar penafsiran, dan teori sebagai kerangka penjelas, sehingga tidak satu pun diperlakukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat pada mahasiswa Kalimantan Tengah.

Penelusuran literatur berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan ketika naskah awal disusun, melalui pencarian kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris seperti falsafah Huma Betang, identitas kewarganegaraan multikultural, interaksi lintas etnis, teori identitas sosial, dan pendidikan kewarganegaraan multikultural. Karena jumlah hasil pada tahap ini tidak terdokumentasi secara lengkap, sumber dari tahap pertama hanya dipertahankan setelah diaudit ulang pada tahap kedua. Tahap kedua merupakan penelusuran terdokumentasi pada 13 Oktober 2026 yang dipandu pertanyaan telaah: bagaimana nilai Huma Betang dapat dihubungkan dengan kualitas interaksi antaretnis, identitas bersama yang mengakui perbedaan, dan kewarganegaraan multikultural mahasiswa? Sarana yang digunakan ialah pencarian semantik SciSpace dengan kueri "How does the Huma Betang philosophy shape interethnic interaction and multicultural citizenship identity among university students in Central Kalimantan?", pencarian web terarah untuk sumber teori, statistik, dan laporan historis, serta pemeriksaan rekaman pada situs Badan Pusat Statistik, penerbit, jurnal, penulis, dan GARUDA.

Kriteria inklusi meliputi sumber berbahasa Indonesia atau Inggris yang (a) membahas langsung konteks Kalimantan Tengah, (b) merupakan karya asli teori atau metode yang dibutuhkan, atau (c) mengkaji Huma Betang dalam kaitannya dengan nilai, pendidikan tinggi, harmoni, atau konflik. Kajian lokal terbitan 2021–2026 diprioritaskan, dengan pengecualian untuk karya teori dasar, rujukan metode, data Sensus Penduduk 2010, laporan konflik 2001, dan kajian lokal terdahulu yang diperlukan untuk memetakan posisi kebaruan. Kriteria eksklusi meliputi duplikasi karya serta kajian yang berfokus pada siswa sekolah, lembaga pemerintahan, atau relasi intrakeagamaan sehingga tidak langsung menjelaskan mekanisme interaksi mahasiswa; kajian semacam ini ditempatkan sebagai cadangan, bukan dinilai tidak bermutu. Status indeks jurnal tidak dijadikan kriteria karena tidak diverifikasi secara sistematis. Setiap sumber dinilai berdasarkan kecocokan klaim dengan isi sumber, desain, subjek, waktu, konteks, dan keterbatasannya. Alur pemilihan sumber disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alur Pemilihan Sumber Kajian

Tahap	Jumlah	Keterangan
Hasil pencarian semantik (tahap 2)	10	Judul dan abstrak diperiksa.
Entri penelusuran terarah (tahap 2)	13	Sumber teori, metode, statistik, laporan konflik, dan kajian Huma Betang prioritas.
Entri sebelum deduplikasi	23	10 + 13 entri register, bukan seluruh hasil mesin pencari.
Duplikat karya	1	Badriah dkk. (2025) muncul pada kedua jalur.
Karya unik yang dipertimbangkan	22	23 – 1.
Ditempatkan sebagai cadangan	7	Kajian siswa sekolah, lembaga pemerintahan, relasi intrakeagamaan, atau sekolah multikultural tanpa fokus Huma Betang.
Rujukan kerja tahap 2	15	Delapan ditelaah pada teks lengkap; tujuh terbatas pada abstrak atau identitas bibliografis.
Sumber naskah awal yang diaudit (tahap 1)	17	Diperiksa kesesuaian klaim dan kelengkapan bibliografisnya.
Sumber tahap 1 yang dikeluarkan	7	Rujukan sekunder untuk teori yang kini dirujuk dari sumber asli (1), tidak relevan dengan klaim yang didukung (4), identitas bibliografis tidak terverifikasi (1), dan rujukan metodologi umum yang diganti sumber asli (1).
Sumber tahap 1 yang dipertahankan	10	Tiga di antaranya juga muncul pada tahap 2.
Korpus sintesis akhir	22	15 rujukan kerja tahap 2 dan 7 sumber tahap 1 yang tidak tumpang tindih.

Sumber: register penelusuran penulis (13 Oktober 2026) dan audit daftar rujukan naskah awal. Rujukan metodologi telaah pustaka tidak dihitung sebagai korpus sintesis.

Delapan rujukan kerja tahap kedua ditelaah pada bagian-bagian relevan teks lengkapnya untuk ekstraksi substantif, yaitu data Sensus Penduduk 2010, laporan International Crisis Group, Banks (2008), Pettigrew dan Tropp (2006), Dovidio dkk. (2009), Loi dkk. (2023), Badriah dkk. (2025), dan Wulandari dkk. (2022). Tujuh rujukan lainnya, terutama buku teori klasik dan buku metodologi, digunakan terbatas sebagai atribusi asal konsep atau pemetaan topik berdasarkan identitas bibliografis dan ringkasannya, sedangkan uraian substantif atas teori tersebut ditopang oleh sumber yang telah ditelaah penuh. Batas akses ini dicatat agar bobot setiap rujukan dalam sintesis dapat ditelusuri.

Analisis data mengikuti tiga alur kegiatan yang berlangsung bersamaan menurut Miles dkk. (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan teknik analisis isi tematik terarah. Unit analisisnya ialah pernyataan atau temuan dalam dokumen. Setiap catatan ekstraksi memuat identitas sumber, bagian atau halaman, parafrasa, jenis klaim (teoretis, temuan lapangan, statistik, atau inferensi penulis), kode, dan batas penggunaannya. Skema kode awal terdiri atas delapan kode: NILAI (uraian nilai atau norma Huma Betang), KONTAK (kondisi dan kualitas hubungan antarkelompok), IDENTITAS (keanggotaan kelompok bersama dan pengakuan identitas asal), KEWARGAAN (kesetaraan hak, kepedulian terhadap ketidakadilan, dan partisipasi), INSTITUSI (norma, aturan, sumber daya, atau tindakan organisasi), KONTEKS (latar waktu, wilayah, sejarah, atau demografi), BATAS (keterbatasan desain, akses, sampel, atau transfer temuan), dan TANDINGAN (bukti atau penafsiran yang menantang hubungan yang diusulkan).

Kondensasi dilakukan dengan memilih bagian yang relevan tanpa membuang informasi yang menantang argumen. Penyajian dilakukan melalui matriks literatur dan matriks triangulasi.

Proposisi dirumuskan dengan menautkan kode yang berulang lintas sumber, yakni NILAI-KONTAK untuk P1, KONTAK-IDENTITAS-KEWARGAAN untuk P2, serta INSTITUSI sebagai kondisi pada P3, lalu setiap tautan diperiksa kembali terhadap kode BATAS dan TANDINGAN sebelum dirumuskan secara bersyarat. Prosedur penilai ganda dan uji kesepakatan antarpemilai tidak dilakukan.

Keabsahan penafsiran dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan jenis bukti, konteks, dan perbedaan penafsiran antarsumber untuk setiap klaim kunci (Tabel 2). Banyaknya sumber yang sepakat tidak otomatis dianggap membuktikan suatu klaim, terutama ketika sumber-sumber tersebut saling berkaitan. Ketergantungan semacam itu dicatat secara eksplisit: Gaertner dan Dovidio (2000) serta Dovidio dkk. (2009) berasal dari garis pengembangan model yang sama sehingga tidak dihitung sebagai dua konfirmasi independen; Badriah dkk. (2025) merujuk Wulandari dkk. (2022) sehingga kesamaan uraian nilai dapat mencerminkan hubungan sitasi; dan data sensus hanya memberi konteks demografis, bukan validasi psikologis.

Tabel 2. Matriks Triangulasi Klaim Kunci

Klaim yang diperiksa	Sumber pembanding	Perbedaan atau penyangkal	Keputusan sintesis
Nilai lokal dapat menjadi landasan praktik kebersamaan.	Loi dkk. (2023); Badriah dkk. (2025); Wulandari dkk. (2022); Pattiasina (2025) dan Karliani dkk. (2018) sebagai pelengkap.	Nilai ideal berbeda dari praktik; rumusan nilai tidak seragam; desain kualitatif tidak mengukur efek.	Layak sebagai dasar P1; pengaruhnya pada kualitas interaksi masih berupa hipotesis.
Kontak lintas etnis memperkuat kewarganegaraan inklusif.	Pettigrew dan Tropp (2006) untuk kontak; Banks (2008) untuk pendidikan kewarganegaraan; Dovidio dkk. (2009) untuk identitas.	Pengurangan prasangka tidak sama dengan identitas kewarganegaraan; identitas bersama dapat menutupi ketimpangan.	P2 dirumuskan sebagai perluasan konseptual, bukan hasil empiris gabungan.
Dukungan institusi menentukan arah penerapan nilai.	Pettigrew dan Tropp (2006); Wulandari dkk. (2022) untuk konteks lokal; Banks (2008) dan Dovidio dkk. (2009) untuk lensa hak dan partisipasi.	Dukungan simbolis dapat berbeda dari perlindungan hak yang nyata; konteks masyarakat tidak identik dengan kampus.	P3 dirumuskan sebagai kondisi moderasi yang perlu diuji.
Huma Betang menjamin harmoni masyarakat majemuk.	Badan Pusat Statistik (2011); International Crisis Group (2001); Wulandari dkk. (2022).	Kemajemukan dan nilai normatif tetap beriringan dengan sejarah konflik.	Klaim deterministik ditolak; digunakan rumusan bersyarat.

Sumber: matriks triangulasi penulis.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Pola Interaksi Lintas Etnis dalam Mengonstruksi Identitas Kewarganegaraan Multikultural Mahasiswa

Konstruksi identitas kewarganegaraan multikultural pada mahasiswa tidak terjadi secara otomatis begitu individu dari berbagai etnis dikumpulkan dalam satu lingkungan kampus. Dalam kerangka teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979), identitas kelompok terbentuk melalui kategorisasi sosial, dan cara kategorisasi itu berlangsung menentukan apakah interaksi lintas kelompok berujung pada penguatan sekat identitas atau pada identitas bersama yang lebih inklusif. Model identitas kelompok bersama (Gaertner & Dovidio, 2000) menjelaskan bahwa prasangka antarkelompok dapat berkurang ketika anggota kelompok yang berbeda memandang diri sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Namun, Dovidio dkk. (2009) membedakan identitas bersama yang meleburkan perbedaan dari identitas ganda, yaitu ketika rasa “kita” yang lebih luas tetap disertai pengakuan atas subkelompok. Pembedaan ini penting karena identitas

bersama yang menutupi perbedaan dapat mengaburkan ketimpangan yang dialami kelompok tertentu. Pada konteks mahasiswa, kampus dapat berfungsi sebagai kelompok bersama tersebut, terutama apabila interaksi berlangsung dalam status yang setara, mengarah pada tujuan bersama, melibatkan kerja sama, dan didukung norma kelembagaan. Pettigrew dan Tropp (2006) menunjukkan bahwa kondisi-kondisi tersebut memperbesar manfaat kontak, tetapi bukan syarat mutlak yang menjamin keberhasilannya.

Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Mahardhika (2025) yang mengamati dinamika identitas kebangsaan di kalangan mahasiswa multikultural. Penelitian kualitatif deskriptif tersebut menemukan bahwa identitas kebangsaan mahasiswa terbentuk melalui proses negosiasi yang berkelanjutan antara nilai lokal, asal-usul budaya, dan identitas nasional Indonesia, bukan melalui penghapusan salah satu di antaranya. Interaksi lintas etnis di lingkungan kampus dapat memperkuat maupun mengaburkan identitas kebangsaan tersebut, bergantung pada konteks sosial dan wacana yang dominan berkembang di lingkungan itu, sementara institusi pendidikan, kurikulum, dan organisasi kemahasiswaan ikut membentuk arahnya. Temuan ini penting untuk memahami perguruan tinggi sebagai ruang yang tidak netral; arah konstruksi identitas mahasiswa sangat bergantung pada bagaimana interaksi lintas etnis difasilitasi, bukan sekadar pada seberapa sering interaksi tersebut terjadi.

Peran fasilitasi kelembagaan ini diperkuat oleh temuan Belianti dkk. (2025) pada komunitas mahasiswa daerah di FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, yang menunjukkan bahwa interaksi antarbudaya yang produktif mencakup partisipasi aktif mahasiswa dari berbagai latar belakang, komitmen bersama terhadap pemahaman lintas budaya, kolaborasi pertukaran gagasan, serta dukungan institusional yang konsisten. Mahasiswa daerah dalam penelitian tersebut menunjukkan respons yang beragam terhadap tekanan globalisasi dan keberagaman kampus; sebagian mengadopsi elemen budaya baru tanpa kehilangan akar budaya asal, sementara sebagian lain mengalami ketegangan antara mempertahankan identitas asli dan tuntutan beradaptasi. Pola ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas kewarganegaraan multikultural bersifat dinamis dan tidak linear, sehingga memerlukan ruang dan waktu yang memadai bagi mahasiswa untuk menegosiasikan posisinya.

Kedua temuan tersebut berasal dari konteks di luar Kalimantan Tengah sehingga tidak dapat dipindahkan begitu saja sebagai gambaran mahasiswa di wilayah ini; keduanya hanya dapat menjadi dasar proposisi yang masih perlu diuji. Data sensus menunjukkan kemajemukan penduduk Kalimantan Tengah (Badan Pusat Statistik, 2011), dan sejarah konflik Sampit memperlihatkan bahwa kemajemukan tidak otomatis menghasilkan relasi yang damai (International Crisis Group, 2001). Namun, data agregat provinsi tidak menjelaskan komposisi etnis mahasiswa, kualitas hubungan antarmahasiswa, ataupun tingkat toleransi mereka. Sejalan dengan Nabilah dkk. (2024) tentang hambatan multikulturalisme terhadap solidaritas kewarganegaraan, sintesis ini mengusulkan bahwa konstruksi identitas kewarganegaraan multikultural pada mahasiswa Kalimantan Tengah tidak dapat diasumsikan terjadi dengan sendirinya. Interaksi lintas etnis mahasiswa, baik di ruang kelas, organisasi kemahasiswaan, maupun kehidupan berasrama, diperkirakan perlu ditopang kerangka nilai bersama yang dikenal dan diterima oleh mahasiswa dari berbagai etnis, agar interaksi tersebut terarah pada penguatan identitas kewarganegaraan yang inklusif, bukan sekadar koeksistensi pasif antarkelompok. Falsafah Huma Betang, yang kerap dirujuk sebagai etika bersama masyarakat Kalimantan Tengah lintas etnis dan agama, berpotensi mengisi kebutuhan akan kerangka nilai bersama tersebut, dengan syarat-syarat yang dibahas pada subbagian berikut.

3.2 Internalisasi Nilai-Nilai Falsafah Huma Betang dalam Dinamika Akademik Mahasiswa Lintas Etnis

Falsafah Huma Betang bukan sekadar konsep historis yang hidup dalam catatan budaya, melainkan kerangka nilai yang terus dirujuk dan dipraktikkan hingga saat ini. Bidin (2026) menegaskan bahwa nilai-nilai inti Huma Betang, yaitu kebersamaan, musyawarah, kesetaraan, gotong royong, dan toleransi, tetap hidup dalam keseharian masyarakat Kalimantan Tengah dan berpotensi besar sebagai sumber epistemologi lokal bagi dunia pendidikan. Loi dkk. (2023) memperkuat temuan ini dengan menempatkan Huma Betang sebagai model filosofi hidup masyarakat Dayak yang mengatur pola relasi sosial secara menyeluruh, antara lain melalui

praktik *handep* sebagai kerja bersama dan *hafakat basara* sebagai permusyawaratan. Perlu dicatat bahwa lima nilai yang digunakan dalam artikel ini merupakan pengelompokan analitis yang dipilih penulis; literatur juga memuat nilai lain seperti kejujuran, kedamaian, penghormatan terhadap hak, dan tanggung jawab sosial, sehingga lima nilai tersebut bukan satu-satunya rumusan baku Huma Betang. Karakteristik relasional inilah yang membuat falsafah ini secara konseptual dapat diperluas ke ranah akademik, termasuk dinamika interaksi mahasiswa lintas etnis di perguruan tinggi Kalimantan Tengah.

Nilai gotong royong dan musyawarah dalam falsafah Huma Betang memiliki padanan yang jelas dalam dinamika akademik mahasiswa. Kegiatan organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan acara kampus, maupun kerja kelompok perkuliahan pada dasarnya adalah ruang gotong royong dalam bentuknya yang modern, sedangkan forum rapat organisasi dan diskusi kelas adalah ruang musyawarah dalam bentuk akademik. Ketika mahasiswa dari latar belakang etnis berbeda terlibat bersama dalam kegiatan semacam ini, nilai-nilai Huma Betang berpotensi terinternalisasi bukan melalui pengajaran normatif semata, melainkan melalui pengalaman langsung bekerja sama dan mengambil keputusan bersama. Badriah dkk. (2025), yang meneliti empat mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2022 di UIN Palangka Raya, mencatat bahwa pewarisan nilai Huma Betang berlangsung melalui pendidikan, aktivitas budaya, media, serta keteladanan keluarga dan masyarakat. Temuan ini mendukung pentingnya keteladanan dan pembiasaan, tetapi subjeknya yang terbatas pada satu program studi belum mewakili relasi mahasiswa lintas etnis secara umum.

Dimensi toleransi dalam falsafah Huma Betang tampak paling menonjol dalam relasi lintas agama, sebagaimana dibahas Pattiasina (2025) melalui kajiannya tentang peran Huma Betang dalam merajut harmoni antarumat beragama dan identitas nasional di Kota Palangka Raya. Motto Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang berkembang di wilayah tersebut menjadi landasan nilai bagi relasi sosial yang inklusif antara masyarakat Dayak dan kelompok etnis lain, dan nilai kebersamaan ini tidak berhenti pada relasi internal masyarakat Dayak, melainkan dihayati sebagai etika hidup bersama lintas identitas secara lebih luas. Dalam konteks kemahasiswaan, dimensi ini relevan untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa dari agama dan etnis berbeda dapat membangun solidaritas tanpa harus menyeragamkan keyakinan atau identitas budaya masing-masing, sejalan dengan pandangan Banks (2008) bahwa identitas budaya dapat dipertahankan bersamaan dengan keanggotaan dan partisipasi dalam komunitas kewarganegaraan bersama.

Internalisasi nilai-nilai Huma Betang dalam dinamika akademik mahasiswa lintas etnis tidak dapat diasumsikan berlangsung secara otomatis, sekalipun nilai-nilai tersebut secara historis telah lama dihayati masyarakat Kalimantan Tengah. Sejalan dengan catatan Belianti dkk. (2025) tentang ketegangan yang dialami sebagian mahasiswa antara mempertahankan identitas asal dan beradaptasi dengan lingkungan baru, mahasiswa yang berasal dari luar tradisi Dayak atau dari luar Kalimantan Tengah berpotensi memandang Huma Betang sekadar sebagai kearifan lokal etnis Dayak, bukan sebagai kerangka nilai bersama yang juga relevan bagi mereka. Kondisi ini menuntut intervensi kelembagaan yang disengaja, seperti pengenalan falsafah Huma Betang sejak masa orientasi mahasiswa baru, integrasi nilai tersebut ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila, serta dorongan bagi organisasi kemahasiswaan untuk mempraktikkan kebersamaan dan musyawarah secara eksplisit lintas etnis. Namun, intervensi semacam ini sekaligus menyimpan persoalan yang perlu dibahas secara kritis.

Menjadikan nilai yang berakar pada satu tradisi etnis sebagai rujukan bersama berisiko dibaca sebagai asimilasi atau hegemoni budaya, yaitu ketika kelompok lain diharapkan menyesuaikan diri dengan norma kelompok yang secara historis dominan di suatu wilayah. Risiko ini nyata karena sebagian kajian cenderung menampilkan Huma Betang sebagai model ideal kehidupan berbangsa (Arianto, 2025), sementara sejarah konflik Sampit menunjukkan bahwa relasi antarkelompok di Kalimantan Tengah tidak lepas dari persoalan kekuasaan dan marginalisasi (International Crisis Group, 2001). Kymlicka (1995) menegaskan bahwa kewarganegaraan multikultural justru menuntut pengakuan atas keanggotaan budaya kelompok, bukan peleburannya ke dalam budaya tertentu, dan Banks (2008) menilai pendidikan kewarganegaraan yang asimilasionis tidak memadai bagi masyarakat majemuk. Dovidio dkk.

(2009) juga menunjukkan bahwa identitas bersama yang menegaskan perbedaan dapat menutupi ketimpangan yang dialami kelompok yang kurang berkuasa.

Atas dasar itu, kerangka ini menempatkan Huma Betang sebagai ruang perjumpaan dan dialog, bukan sebagai doktrin yang harus diadopsi kelompok lain. Akomodasi terhadap nilai kelompok etnis lain dirumuskan melalui tiga prinsip. Pertama, prinsip resiprositas: mahasiswa dari berbagai latar belakang diundang mengenali padanan nilai kebersamaan, musyawarah, dan kerja bersama dalam tradisi mereka sendiri, sehingga Huma Betang berfungsi sebagai titik temu yang memperkaya, bukan menggantikan, khazanah nilai setiap kelompok. Kedua, prinsip kesetaraan prosedural: musyawarah dalam semangat *hafakat basara* hanya bermakna apabila setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, menyatakan ketidaksetujuan, dan memengaruhi keputusan, termasuk mahasiswa dari kelompok yang jumlahnya kecil. Ketiga, prinsip perlindungan hak: rujukan pada nilai lokal harus disertai jaminan kelembagaan terhadap diskriminasi agar kebersamaan tidak berubah menjadi tekanan untuk menyesuaikan diri. Dengan ketiga prinsip tersebut, keluaran yang dituju ialah identitas ganda, yakni rasa memiliki komunitas kampus dan bangsa yang tetap memberi ruang bagi identitas etnis masing-masing. Pemetaan nilai dan prinsip akomodasinya dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Nilai-Nilai Huma Betang dalam Dinamika Akademik Mahasiswa Lintas Etnis

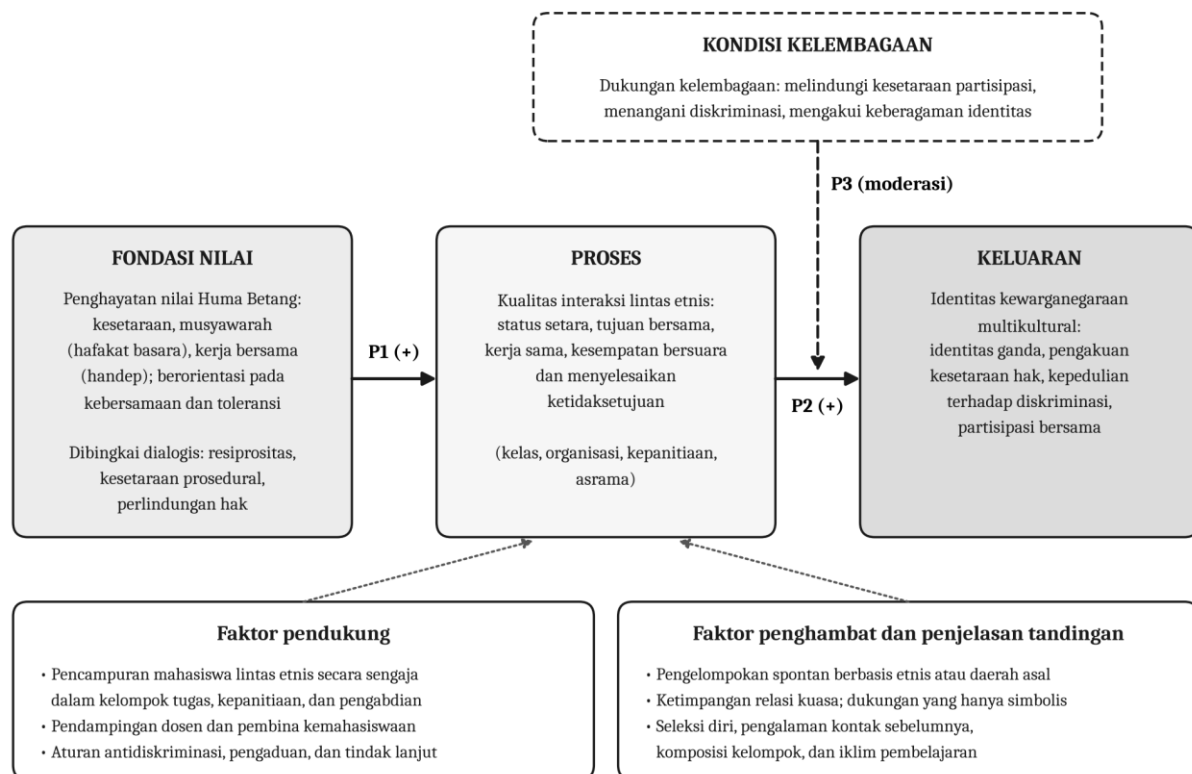
Nilai Huma Betang	Wujud/Padanan dalam Dinamika Akademik Mahasiswa	Prinsip Akomodasi Lintas Tradisi
Gotong royong (<i>handep</i>)	Kegiatan organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan acara kampus, dan kerja kelompok perkuliahan.	Pembagian peran yang setara; mahasiswa dapat membawa praktik kerja bersama dari tradisinya sendiri.
Musyawarah (<i>hafakat basara</i>)	Forum rapat organisasi kemahasiswaan dan diskusi kelas.	Kesempatan yang sama untuk berbicara, menyatakan ketidaksetujuan, dan memengaruhi keputusan.
Toleransi	Relasi lintas etnis dan lintas agama yang inklusif di lingkungan kampus, tanpa menuntut penyeragaman keyakinan atau identitas budaya mahasiswa.	Pengakuan identitas etnis dan agama sebagai bagian sah dari identitas kampus.
Kebersamaan dan kesetaraan	Kualitas yang melekat pada seluruh ruang interaksi di atas, berupa status setara dan tujuan bersama di antara mahasiswa lintas etnis.	Kondisi yang memperbesar manfaat interaksi, bukan syarat mutlak; ditopang perlindungan terhadap diskriminasi.

Sumber: disintesis oleh penulis dari pembahasan Subbagian 3.2 (Banks, 2008; Loi dkk., 2023; Pettigrew & Tropp, 2006).

3.3 Desain Kerangka Konseptual Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Huma Betang untuk Perguruan Tinggi Kalimantan Tengah

Sintesis atas pola interaksi lintas etnis dan proses internalisasi nilai Huma Betang pada dua subbagian sebelumnya menjadi dasar penyusunan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Endayani (2023) mengelompokkan model pendidikan berbasis kearifan lokal ke dalam beberapa varian, yaitu pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme, pendidikan pemahaman kebudayaan, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan, dan pendidikan dwibudaya, dengan nilai yang diusung mencakup pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan moral. Merujuk pengelompokan tersebut, kerangka konseptual yang diusulkan memosisikan falsafah Huma Betang bukan sebagai muatan lokal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fondasi nilai yang meresap ke dalam keseluruhan proses interaksi lintas etnis mahasiswa, sehingga pendidikan pemahaman kebudayaan dan pendidikan bagi pluralisme kebudayaan dapat berjalan bersamaan dalam satu kerangka yang koheren.

Kerangka konseptual yang diusulkan tersusun atas tiga komponen yang saling berkaitan dan satu kondisi kelembagaan (Gambar 1). Komponen pertama adalah fondasi nilai, yaitu penghayatan falsafah Huma Betang yang menekankan kesetaraan, musyawarah, dan kerja bersama, dengan kebersamaan dan toleransi sebagai orientasinya. Penghayatan dipahami sebagai penerapan nilai dalam relasi sehari-hari, bukan sekadar pengetahuan tentang simbol budaya (Badriah dkk., 2025; Loi dkk., 2023). Komponen kedua adalah kualitas interaksi lintas etnis, mencakup ruang-ruang akademik dan kemahasiswaan tempat mahasiswa lintas etnis berinteraksi secara langsung, seperti perkuliahan kolaboratif, organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan lintas etnis, dan kehidupan berasrama. Kualitas interaksi ditandai oleh status yang setara, tujuan bersama, kerja sama, serta kesempatan berbicara dan menyelesaikan ketidaksetujuan (Pettigrew & Tropp, 2006). Komponen ketiga adalah identitas kewarganegaraan multikultural sebagai keluaran yang diperkirakan, yaitu kondisi ketika mahasiswa mampu mempertahankan identitas etnis asalnya sekaligus mengembangkan rasa memiliki bersama sebagai sesama warga negara dan sesama anggota komunitas akademik, disertai pengakuan kesetaraan hak dan kesediaan berpartisipasi bersama (Banks, 2008; Dovidio dkk., 2009). Dukungan kelembagaan ditempatkan sebagai kondisi yang melintasi seluruh kegiatan, bukan sekadar kesetaraan peran dalam satu pertemuan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Huma Betang

Sumber: disusun penulis berdasarkan sintesis literatur. Garis putus-putus dari kondisi kelembagaan menunjukkan peran moderasi (P3); panah titik-titik menunjukkan faktor yang memengaruhi berlangsungnya proses.

Hubungan antarkomponen tersebut dirumuskan dalam tiga proposisi. P1 dan P2 membentuk alur nilai–proses–identitas, sedangkan P3 menetapkan kondisi kelembagaan pada hubungan proses–identitas.

P1 (nilai dan kualitas interaksi). Semakin kuat penghayatan nilai Huma Betang yang menekankan kesetaraan, musyawarah, dan kerja bersama, semakin baik kualitas interaksi lintas etnis mahasiswa. Proposisi ini bertumpu pada kajian kualitatif tentang makna *handep* dan *hafakat basara*, pewarisan nilai, serta praktik rekonsiliasi (Badriah dkk., 2025; Loi dkk., 2023; Wulandari dkk., 2022). Arah hubungannya merupakan inferensi penulis karena tidak satu pun sumber tersebut mengukur kualitas interaksi.

P2 (kualitas interaksi dan identitas kewarganegaraan). Kualitas interaksi lintas etnis yang lebih baik diperkirakan memperkuat identitas kewarganegaraan multikultural melalui berkembangnya rasa menjadi bagian dari komunitas bersama yang tetap mengakui identitas etnis. Landasannya ialah bukti meta-analisis tentang kontak antarkelompok (Pettigrew & Tropp, 2006), pembedaan identitas bersama dan identitas ganda (Dovidio dkk., 2009), serta konsep pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat majemuk (Banks, 2008). Karena keluaran yang diukur dalam literatur kontak adalah prasangka, bukan identitas kewarganegaraan, P2 merupakan perluasan konseptual; identitas ganda dapat diteliti sebagai mediator, tetapi belum dibuktikan dalam artikel ini.

P3 (dukungan kelembagaan sebagai moderator). Hubungan positif antara kualitas interaksi lintas etnis dan identitas kewarganegaraan multikultural diperkirakan lebih kuat pada perguruan tinggi yang melindungi kesetaraan partisipasi, menangani diskriminasi, dan mengakui keberagaman identitas. Dukungan otoritas dan norma merupakan salah satu kondisi kontak yang memperbesar manfaatnya (Pettigrew & Tropp, 2006), sedangkan Banks (2008) dan Dovidio dkk. (2009) menegaskan pentingnya pengakuan hak dan perbedaan. Wulandari dkk. (2022) memberi gambaran lokal tentang peran tokoh dan lembaga dalam memelihara relasi pascakonflik, meskipun konteks masyarakat tidak identik dengan kampus.

Kerangka ini juga memuat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kebijakan kampus yang secara sengaja mencampur mahasiswa lintas etnis dalam kelompok tugas, kepanitiaan, dan program pengabdian masyarakat; pendampingan dosen dan pembina kemahasiswaan agar interaksi berlangsung produktif; serta aturan antidiskriminasi yang disertai mekanisme pengaduan dan tindak lanjut. Faktor penghambat meliputi pengelompokan spontan berdasarkan kedekatan etnis atau daerah asal, ketimpangan relasi kuasa antara kelompok besar dan kecil, serta dukungan kelembagaan yang bersifat simbolis tanpa perlindungan hak yang nyata. Penjelasan tandingan juga perlu diperhitungkan, terutama seleksi diri: mahasiswa yang sejak awal lebih inklusif mungkin lebih aktif dalam kegiatan lintas etnis, sehingga hubungan yang tampak antara interaksi dan identitas dapat sebagian berasal dari karakteristik awal mahasiswa. Pengalaman kontak sebelumnya, komposisi kelompok, dan iklim pembelajaran juga dapat memengaruhi hubungan tersebut.

Pada tataran implementasi, fondasi nilai dapat diwujudkan melalui pengenalan falsafah Huma Betang secara dialogis pada masa orientasi mahasiswa baru dan integrasinya ke dalam materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila, sejalan dengan jalur formal dan keteladanan yang diusulkan Sugiyanto dkk. (2019) pada jenjang pendidikan dasar. Indikator awal untuk setiap konstruk disajikan pada Tabel 4. Indikator tersebut merupakan rancangan penulis yang diturunkan dari kondisi kontak (Pettigrew & Tropp, 2006), konsep identitas ganda (Dovidio dkk., 2009), dan kewarganegaraan dalam masyarakat majemuk (Banks, 2008), bukan skala yang telah divalidasi.

Tabel 4. Konstruk, Kedudukan, dan Indikator Awal Kerangka Konseptual

Konstruk	Kedudukan dalam Kerangka	Indikator Awal yang Dapat Diamati	Bukti/Unit Analisis yang Diperlukan
Penghayatan nilai Huma Betang	Fondasi nilai; awal P1	Alasan menerima perbedaan; konsistensi musyawarah; tindakan saling membantu.	Wawancara dan refleksi tertulis mahasiswa; pengecekan kesesuaian dengan praktik.
Kualitas interaksi lintas etnis	Proses; keluaran P1 dan awal P2	Kesetaraan peran, tujuan bersama, kerja sama, serta kesempatan berbicara dan menyelesaikan ketidaksetujuan.	Observasi kegiatan atau kelompok, catatan peran, dan penilaian peserta.

Konstruk	Kedudukan dalam Kerangka	Indikator Awal yang Dapat Diamati	Bukti/Unit Analisis yang Diperlukan
Identitas ganda	Mekanisme yang dapat diuji sebagai mediator P2	Rasa memiliki komunitas kampus dan bangsa bersamaan dengan kebebasan mempertahankan identitas etnis.	Narasi identifikasi dan pengalaman penerimaan.
Identitas kewarganegaraan multikultural	Keluaran P2	Pengakuan kesetaraan hak, kepedulian terhadap diskriminasi, dan kesediaan berpartisipasi bersama.	Respons atas skenario kewarganegaraan dan bukti partisipasi; dibedakan dari sekadar kerukunan.
Dukungan kelembagaan	Moderator P3	Aturan antidiskriminasi, akses pengaduan, tindak lanjut kasus, dan keterwakilan yang bermakna.	Dokumen kebijakan, praktik pelaksanaan, dan pengalaman mahasiswa berbagai etnis.

Sumber: rancangan penulis berdasarkan sintesis literatur; indikator belum divalidasi.

Kerangka konseptual ini menawarkan kontribusi berupa integrasi konseptual dan penetapan batas hubungan. Berbeda dari kajian terdahulu yang menyoroti pewarisan nilai, pendidikan karakter, harmoni antaragama, atau sikap toleransi (Badriah dkk., 2025; Loi dkk., 2023; Pattiasina, 2025; Sugiyanto dkk., 2019), kerangka ini menautkan penghayatan nilai Huma Betang dengan kualitas interaksi lintas etnis dan identitas kewarganegaraan multikultural, serta menempatkan dukungan kelembagaan dan pengakuan identitas etnis sebagai bagian dari hubungan tersebut. Kerangka ini bersifat proposisional dan belum diuji secara empiris. Pengujian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman mahasiswa berbagai etnis maupun pendekatan kuantitatif untuk menguji P1–P3. Pengujian mediasi identitas ganda memerlukan desain dengan urutan waktu yang jelas karena survei potong lintang tidak cukup untuk memastikan mekanisme kausal. Apabila dukungan kelembagaan diukur pada tingkat kampus, desain penelitian perlu memperhitungkan pengelompokan mahasiswa di dalam kampus dan variasi antarkampus. Label mayoritas dan minoritas juga perlu ditetapkan sesuai konteks kampus yang benar-benar diteliti, bukan diturunkan dari komposisi penduduk provinsi.

4. Simpulan dan saran

Sintesis literatur dalam artikel ini mengusulkan bahwa identitas kewarganegaraan multikultural mahasiswa terbentuk melalui proses negosiasi yang berkelanjutan, bukan melalui penghapusan identitas etnis asal. Berdasarkan teori identitas sosial dan kontak antarkelompok serta kajian mahasiswa di luar Kalimantan Tengah, interaksi lintas etnis diperkirakan memperkuat rasa kebangsaan yang inklusif apabila berlangsung dalam status yang setara, bertujuan bersama, melibatkan kerja sama, dan ditopang dukungan kelembagaan, tetapi berpotensi memperkuat sekat kelompok apabila dibiarkan tanpa arah. Perguruan tinggi, dengan demikian, bukan ruang netral yang secara otomatis menghasilkan sikap kewarganegaraan inklusif. Proposisi ini belum merupakan temuan empiris tentang mahasiswa Kalimantan Tengah.

Nilai-nilai falsafah Huma Betang, yaitu kebersamaan, musyawarah, kesetaraan, gotong royong, dan toleransi, memiliki padanan konkret dalam kehidupan kampus, seperti kerja kelompok dan kepanitiaan sebagai wujud gotong royong, serta rapat organisasi dan diskusi kelas sebagai wujud musyawarah. Literatur menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih efektif diwariskan melalui keteladanan dan pembiasaan, tetapi internalisasinya tidak dapat diasumsikan terjadi dengan sendirinya. Agar tidak dibaca sebagai asimilasi, Huma Betang perlu ditempatkan sebagai ruang dialog lintas tradisi yang disertai kesetaraan prosedural dan perlindungan hak, bukan sebagai norma satu etnis yang harus diadopsi kelompok lain.

Kerangka konseptual yang dihasilkan terdiri atas fondasi nilai, kualitas interaksi lintas etnis, dan identitas kewarganegaraan multikultural, dengan dukungan kelembagaan sebagai kondisi yang memperkuat hubungan antarkomponen. Hubungan tersebut dirumuskan dalam tiga

proposisi: penghayatan nilai Huma Betang diperkirakan mendukung kualitas interaksi lintas etnis (P1); kualitas interaksi diperkirakan memperkuat identitas kewarganegaraan yang mengakui perbedaan (P2); dan dukungan kelembagaan diperkirakan memperkuat hubungan tersebut (P3).

Kontribusi artikel ini terletak pada integrasi konseptual dan penetapan batas hubungan, sedangkan keberlakuannya pada mahasiswa memerlukan pengujian empiris. Penelitian selanjutnya disarankan menguji P1–P3 pada perguruan tinggi tertentu di Kalimantan Tengah dengan data komposisi etnis mahasiswa yang mutakhir, memperhitungkan penjelasan tandingan seperti seleksi diri dan pengalaman kontak sebelumnya, serta mengembangkan dan memvalidasi instrumen berdasarkan indikator awal pada Tabel 4. Bagi perguruan tinggi, kerangka ini dapat menjadi rujukan awal dalam merancang orientasi mahasiswa baru, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan kebijakan kemahasiswaan yang mendorong interaksi lintas etnis yang setara.

Daftar Rujukan

- Arianto, J. (2025). Falsafah Huma Betang: Sumbangsiah karakter unggul masyarakat Dayak Ngaju bagi Indonesia. *Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*, 23(2), 94–113. <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v23i2.1443>
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2012/05/23/55eca38b7fe0830834605b35/nationality--ethnicity--religion--and-dailylanguage-of-indonesian-population.html>
- Badriah, S., A'ini, N. N., Marhamah, Majidi, M. W., & Anshari, M. R. (2025). Mewariskan pendidikan karakter melalui filosofi Huma Betang di Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 10(1), 227–239. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v10i1.2304>
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Belianti, I. D., Surya, R. I., & Sya'bana, S. (2025). Globalization and cultural diversity on campus: A study of intercultural interactions. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 30(1), 13–19. <https://doi.org/10.21831/hum.v30i1.68717>
- Bidin. (2026). Huma Betang sebagai kerangka epistemologis pendidikan humaniora. *At-Taksis: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.55799/attaksis.v3i2.823>
- Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., & Saguy, T. (2009). Commonality and the complexity of “we”: Social attitudes and social change. *Personality and Social Psychology Review*, 13(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/1088868308326751>
- Endayani, H. (2023). Model pendidikan berbasis kearifan lokal. *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 25–32. <https://doi.org/10.56832/pema.v3i1.321>
- Gaertner, S. L., & Dovidio, J. F. (2000). *Reducing intergroup bias: The common ingroup identity model*. Psychology Press.
- International Crisis Group. (2001). *Communal violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan* (Asia Report No. 19). <https://icg-prod.s3.amazonaws.com/19-communal-violence-in-indonesia-lessons-from-kalimantan.pdf>
- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat penelitian dengan model pendekatan telaah kepustakaan. *TIK ILMEU: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 7(1), 117–126. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Karlani, E., Lion, E., & Sakman. (2018). Huma Betang philosophy as the solidarity prototype and ethnic conflict prevention in Dayak communities of Central Kalimantan. Dalam *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (hlm. 391–397). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.90>
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Clarendon Press.
- Loi, A., Kwirinus, D., & Peri, H. (2023). The concept of “Huma Betang” as a model of the values of the philosophy of life of the Dayak community in Central Kalimantan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 14(2), 219–227. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i2.64914>

- Mahardhika, M. F. P. (2025). Dinamika identitas negara di kalangan mahasiswa multikultural. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1225–1230. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16110>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Ed. ke-3). SAGE Publications.
- Nabilah, Z., Hudi, I., Bella, S., Doni, S. N., Azhara, S. C., & Pradana, F. A. (2024). Tantangan multikulturalisme terhadap solidaritas kewarganegaraan dalam masyarakat majemuk. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 82–89. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2482>
- Pattiasina, S. M. O. (2025). Huma Betang's philosophy: Interreligious harmony and weaving of national identity in Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 21(1), 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v21i1.9348>
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5), 751–783. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyanto, R., Azahari, A. R., Kartiwa, W., & Saprilina. (2019). Internalisasi falsafah rumah betang untuk membentuk sikap toleransi. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1), 36–43. <https://doi.org/10.33084/tunas.v5i1.1189>
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Dalam W. G. Austin & S. Worchel (Ed.), *The social psychology of intergroup relations* (hlm. 33–47). Brooks/Cole.
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Wulandari, Y. W., Wahyuningrum, P. M. E., & Christiana, T. (2022). Pendekatan humanis dalam falsafah Huma Betang untuk meminimalisir gesekan konflik etnis. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, 8(2), 115–123. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v8i2.104>